



JURNAL GAWALISE
GEOGRAFI, WILAYAH, LINGKUNGAN, DAN PESISIR

Gawalise Vol. 1 No. 2 Tahun 2022 | 92 – 101

<https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/gt>

Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh dan Kebutuhan Sarana Mitigasi Bencana Kebakaran

Fani Febrinia Salindiri^{1,a}, Siti Fadjarajani², Iman Hilman³

^{1,2,3}Pendidikan Geografi, Universitas Siliwangi

^afani.f.salindri@gmail.com

| Article info | ABSTRAK |
|--|---|
| <p><i>Article History</i></p> <p>Diterima : November 2022</p> <p>Revisi : Januari 2023</p> <p>Dipublikasikan : Januari 2023</p> <p>Kata kunci:</p> <p>Permukiman kumuh</p> <p>Mitigasi</p> <p>Bencana kebakaran</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan kawasan permukiman kumuh dan kebutuhan sarana prasarana mitigasi kebakaran di kawasan permukiman kumuh di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data yang dilakukan melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah keberadaan kawasan permukiman kumuh masih ada seluas 2,13 Ha yang berada di RW 02 dan RW 12 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang. Adapun kondisi di lapangan diketahui terindikasi permukiman kumuh dan tingkat kebutuhan sarana prasarana mitigasi kebakaran di RW 02 dan RW 12 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang sangat tinggi dengan kondisi seperti di antaranya adalah jalan yang sempit, bangunan yang rapat dan tidak beraturan serta masih ditemukannya rumah tidak layak huni yang termasuk daripada indikator permukiman kumuh; implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Tasikmalaya masih belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kota Tasikmalaya masih ditemukan kawasan permukiman kumuh dan masih sangat membutuhkan sarana prasarana mitigasi bencana kebakaran.</p> |
| <p>Keywords:</p> <p>Slums</p> <p>Mitigation</p> <p>Fire Disaster</p> | <p>ABSTRACT</p> <p><i>This study aims to determine the existence of slum areas and the need for fire mitigation infrastructure in slum areas in Tasikmalaya City. This study uses a type of qualitative research, with data collection techniques carried out through literature studies, observations, interviews and documentation studies. The results of this study are that there are 2.13 hectares of slum areas in RW 02 and RW 12, Lengkongsari Village, Tawang District. As for the conditions in the field, it is known that there are indications of slum settlements and the level of need for fire mitigation infrastructure in RW 02 and RW 12 Lengkongsari Village, Tawang District is very high with conditions such as narrow roads, dense and irregular buildings and uninhabitable houses. which includes indicators of slum settlements; the implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Tasikmalaya City has not been implemented properly. It can be concluded that the City of Tasikmalaya is still found in slum areas and still desperately needs fire disaster mitigation infrastructure.</i></p> |



Pendahuluan

Kependudukan di Indonesia salah satunya adalah dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata, dimana mayoritas penduduk Indonesia tersebar di pulau Jawa tercatat sekitar 56,1% dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2020). Penyebab

tingginya wilayah perkotaan disebabkan arus urbanisasi sehingga wilayah perkotaan di Indonesia semakin padat. Persebaran penduduk di Indonesia tertinggi berpusat pada wilayah perkotaan di propinsi Jawa Barat. Tingginya angka urbanisasi di perkotaan mendorong peningkatan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal. Keterbatasan ruang atau lahan untuk tempat tinggal yang baik dan layak untuk penduduk namun menjadi kebutuhan yang dasar dan mendesak. Permintaan lahan yang sangat tinggi di perkotaan menyebabkan pula harga lahan yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan penduduk atau masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah memiliki kecenderungan untuk mencari lahan permukiman di pinggiran kota dengan lingkungan yang kurang memadai dan memunculkan fenomena permukiman kumuh dan padat di perkotaan.

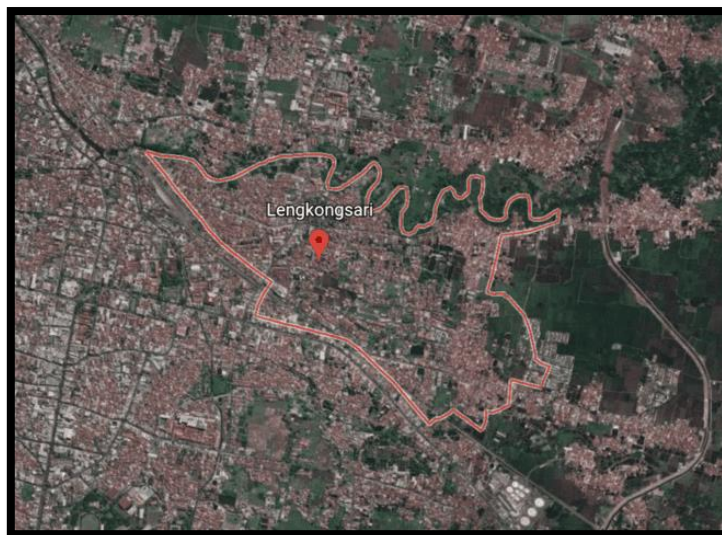
Permukiman kumuh menjadi permasalahan yang perlu ditangani oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan dan pelaksana dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 H ayat 1 bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai *stakeholder* berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga swasta, masyarakat dan pihak yang peduli dengan masalah permukiman kumuh ini dapat dituntaskan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut sehingga dengan harapan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat yang berada di kawasan kumuh.

Terwujudnya perkotaan dengan permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat yang berarti layak untuk dihuni juga aman dari segala bahaya. Salah satu bahaya atau ancaman yang sering menimbulkan kecemasan masyarakat perkotaan terutama di kawasan permukiman yang padat adalah bencana kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang biasa terjadi di wilayah perkotaan terutama di wilayah permukiman padat penduduk dan tidak menutup kemungkinan terjadi di wilayah permukiman kumuh (Firda, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keberadaan kawasan permukiman kumuh dan kebutuhan sarana prasarana mitigasi kebakaran di kawasan permukiman kumuh dan implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Tasikmalaya.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang mana data yang diperoleh tidak dapat dinumerisasi sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif dan eksploratif (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya Kelurahan Lengkongsari RW 02 dan RW 12 (Gambar 1).



Gambar 1. Lokasi Penelitian
Sumber: Google Map

Subjek penelitian dalam penentuan sumber data, penulis menggunakan teknik purposive sampling di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Kepala Bidang Permukiman Sarana Utilitas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya (Bagian Pemadam Kebakaran)
3. Fasilitator program KOTAKU Kelurahan Lengkongsari
4. Ketua RW di Kelurahan Lengkongsari yakni RW. 02 dan RW. 12
5. Masyarakat RW. 02 (RT. 05), dan RW. 12 (RT. 01, 02 dan 03) sebagai Ketua RT/Karang Taruna/masyarakat tertentu yang akan diambil tiga orang setiap RT.

Teknik pengambilan data yang dilakukan melalui studi literatur, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara dengan kisi-kisi terlampir. Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna

dari fenomena tersebut. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan uji validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan data pada tabel 2 mendeskripsikan bahwa lokasi penelitian ini yakni Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang di Kota Tasikmalaya termasuk kepadatan penduduk yang tinggi dengan angka kepadatan 26,40 per km².

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Luas & Kepadatan Penduduk Kecamatan Tawang

| No | Nama Kelurahan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Luas Wilayah (km ²) | Kepadatan Penduduk (per km ²) |
|----|----------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | Kahuripan | 21.972 | 2,702 | 8,13 |
| 2 | Cikalang | 13.873 | 1,248 | 11,12 |
| 3 | Empangsari | 7.281 | 0,389 | 18,72 |
| 4 | Tawang Sari | 4.868 | 0,435 | 11,19 |
| 5 | Lengkongsari | 15.211 | 0,576 | 26,40 |

Sumber: Kecamatan Tawang dalam Angka 2021, BPS

Sebagai upaya mengatasi permasalahan kota tersebut Pemerintah Kota melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permasalahan permukiman kumuh ini dengan upaya strateginya berupa program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program ini merupakan lanjutan dari program PNPM Mandiri Perkotaan. Adapun tujuan dari pada program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Tabel 3. Data Pengurangan Kawasan Kumuh Kota Tasikmalaya Tahun 2021

| No | Kelurahan | Kecamatan | Luas Kawasan Kumuh (Ha) | Luas Sisa Kawasan Kumuh 2022 (Ha) |
|----|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Cipedes | Cipedes | 20,16 | 0 |
| 2 | Panglayungan | Cipedes | 9,83 | 0 |
| 3 | Cilembang | Cihideung | 35,77 | 0 |
| 4 | Argasari | Cihideung | 3,78 | 0 |
| 5 | Nagarawangi | Cihideung | 22,76 | 0 |
| 6 | Mulyasari | Tamansari | 33,18 | 0 |
| 7 | Lengkongsari | Tawang | 23,98 | 2,13 |
| 8 | Kahuripan | Tawang | 12,04 | 0 |
| 9 | Bantarsari | Bungursari | 7,32 | 0 |
| 10 | Panyingkiran | Indihiang | 11,73 | 0 |
| 11 | Sukamaju Kaler | Indihiang | 3,62 | 0 |
| 12 | Sukamaju Kidul | Indihiang | 20,15 | 0 |
| 13 | Talagasari | Kawalu | 15,95 | 0 |
| 14 | Gunung Tandala | Kawalu | 5,27 | 0 |
| 15 | Cipawitra | Mangkubumi | 4,98 | 0 |
| 16 | Linggajaya | Mangkubumi | 22,70 | 0 |
| 17 | Mangkubumi | Mangkubumi | 20,17 | 0 |
| 18 | Cipari | Mangkubumi | 2,78 | 0 |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun tercatat mengalami pengurangan luasan kawasan kumuh. Pada Tabel 3 terdapat kawasan kumuh yang tersisa di tahun 2022 yakni wilayah Kelurahan Lengkongsari yang berada di Kecamatan Tawang dengan sisa luasannya 2,13 Ha.

Adanya program KOTAKU yang telah diimplementasikan di Kota Tasikmalaya, menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih rinci terkait dengan penanganan permukiman kumuh. Dalam perwujudan permukiman perkotaan yang layak dan aman bagi masyarakat dengan indikasi dari pada permukiman kumuh dan padat memunculkan berbagai potensi kebencanaan seperti salah satunya adalah kebakaran sesuai dengan latar belakang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa kebakaran di lokasi penelitian seperti yang pernah terjadi pada tahun 2019 di kelurahan Lengkongsari seperti dipublikasikan pada artikel Koropak (Gambar 1).



Gambar 1. Peristiwa kebakaran di Lengongsari
Sumber: koropak.co.id

Kebakaran tersebut terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya jaringan jalan dan pengelolaan sampah. Adanya jaringan jalan tersebut di kawasan permukiman kumuh dan padat dapat menciptakan ruang sehingga dapat mencegah perambatan kebakaran, sarana pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku menjadi indikator ancaman terjadinya bencana (Firda, 2017), seperti peristiwa kebakaran di artikel tersebut pemicu utama kebakaran di permukiman adalah pengelolaan sampah yang dilakukan yang tidak sesuai yaitu dengan cara dibakar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya mencatat kasus kebakaran di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, namun dalam rentang satu tahun dengan berdasarkan data rekapitulasi kejadian kebakaran, tercatat kasus kebakaran tahun 2020 adalah 34 kasus dan pada tahun 2021 tercatat 29 kasus.

Tabel 4. Data Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2020

| No | Nama/Jenis Kendaraan | Vol. (Liter) |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Fire Truck Pemadam Kebakaran | 3000 |
| 2 | Fire Truck Pemadam Kebakaran | 3000 |
| 3 | Fire Truck Pemadam Kebakaran | 3000 |
| 4 | Fire Truck Pemadam Kebakaran | 3000 |
| 5 | Fire Truck Powersupply Damkar | 5000 |
| 6 | Jeep Komando | - |

Sumber : BPBD Kota Tasikmalaya

Pada tabel 4 tercatat ketersediaan mobil pemadam kebakaran yang ada untuk tingkat kota. Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan beberapa kondisi ditemukan bahwa jaringan jalan di kawasan permukiman kumuh dan padat sebagian jalan permukiman sempit sehingga sulit diakses oleh kendaraan tersebut jika terjadi kebakaran. Berikut ini kondisi di lapangan hasil observasi.



Gambar 2. Bangunan tidak beraturan

Pada gambar 2 ini menunjukkan permukiman di lapangan tidak beraturan sehingga termasuk pada indikasi permukiman kumuh. Adapun pada gambar 3, tergambar bahwa apabila terjadi kebakaran, akan sangat sulit dilalui kendaraan *Fire truck* atau Pemadam Kebakaran.



Gambar 3. Salah satu jalan sempit di lokasi penelitian



Gambar 4. Rumah Tidak Layak Huni

Pada gambar 4, tergambar bahwa masih ditemukan rumah penduduk yang tidak layak huni sehingga mencerminkan masih ada kawasan kumuh di Kota Tasikmalaya. Permukiman kumuh memiliki potensi untuk dilanda bencana kebakaran karena kondisinya yang tidak memenuhi standar yang ditentukan. Menurut UU No. 1 Tahun 2011, permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Simpulan

Masih ditemukan kawasan kumuh di Kota Tasikmalaya tepatnya di RW 02 dan RW 12 Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang dan sangat dibutuhkan sarana prasarana mitigasi kebakaran yang mendukung implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Keadaan struktur bangunan di permukiman kumuh tergolong semi permanen, kepadatan tinggi, dan rawan terhadap bencana kebakaran.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, & Suriyani, E. (2022). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 1-14.
- Amalia, A. A. (2018). Karakteristik Hunia Permukiman Kumuh Kampung Sapiria Kelurahan Lembo Kota Makassar. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 13-22.

- Arung, R., & Ulimaz, M. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kumuh Permukiman Kumuh di Kelurahan Baru Ulu Kota Balikpapan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 472-481.
- Asiri, L. (2020). Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 28-40.
- Firda, D., Sobirin, & Indra, T. L. (2017). Sensitivitas Permukiman Kumuh Terhadap Bencana Kebakaran di Kota Bekasi. *IRONS: Industrial Research Workshop and National Seminar*, 600-605.
- Rachman, D. N., & Chairil. (2019). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran di Kawasan Padat Penduduk (Studi Kasus pada Kelurahan Kertapati Palembang). *Jurnal Ilmiah TEKNIKA*, 117-129.
- Rahman, S., Mentayani, I., Rusmilyansari, & Mahreda, E. S. (2019). Konsep Penataan Permukiman Kumuh Tepian Sungai di Kelurahan Sungai Bilu Kota Banjarmasin. *EnviroScienteeae*, 397-414.
- Rahmani, M. R., Arifin, J., & Rijali, S. (2020). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam Mengatasi Permukiman kumuh di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 196-212.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung*, 1-23.
- Sutanti, N., Tjahjono, B., & Syaufina, L. (2020). Analisis Risiko Bencana Kebakaran di Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat. *Tata Loka*, 162-174.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Permen Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Permen Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan Peningkatan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana.

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.